



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(Audited)

Jalan Pramuka Nomor 9 Padang
Sumatera Barat

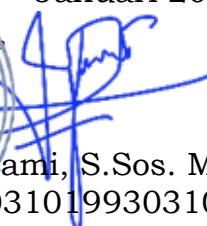
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Januari 2026
Sekretaris,

Irzal Zamzami, S.Sos. M.Si
NIP 197403101993031002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	1

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
JALAN PRAMUKA RAYA NO.9 BELANTI PADANG
TELEPON 0751 443017

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat *Audited* yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Mei 2026

Sekretaris,



Irzal Zamzami, S.Sos. M.Si
NIP 197403101993031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp368,074,871 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp22,407,882,564 atau mencapai 99.69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22,477,122,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp13,193,982,355 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13,193,982,355; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3,862,537 dan Rp13,190,119,818.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24,144,635, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24,963,452,976 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(24,939,308,341). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1,957,814,660 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(22,981,493,681).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp41,902,004,478 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(22,981,493,681) kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi Ekuitas Rp(23,232,143,649), Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp(205,000), Lain-lain sebesar Rp(23,231,938,649) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp17,501,752,670 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp13,190,119,818.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25		% thd Angg	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	368.074.871	0,00	25.780.505
JUMLAH PENDAPATAN		-	368.074.871	0,00	25.780.505
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	7.958.594.000	7.950.253.131	99,90	6.694.029.133
Belanja Barang	B.4	14.255.276.000	14.194.688.985	99,57	157.787.278.213
Belanja Modal	B.5	263.252.000	262.940.448	99,88	5.534.592.694
JUMLAH BELANJA		22.477.122.000	22.407.882.564	99,69	170.015.900.040

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NERACA

PER 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	27.794.974.912
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.6	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.7	-	1.290.726.656
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.8	-	-
Persediaan	C.9	-	-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	29.085.701.568
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	3.111.363.000	3.111.363.000
Peralatan dan Mesin	C.16	9.723.007.648	9.510.792.200
Gedung dan Bangunan	C.17	2.485.034.074	988.149.650
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	4.470.954.264	3.318.465.014
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(6.596.376.631)	(5.123.348.164)
Jumlah Aset Tetap		13.193.982.355	11.805.421.700
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	-	2.936.368.833
Aset Lain-Lain	C.23	298.932.130	298.932.130
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(298.932.130)	(298.932.130)
Jumlah Aset Lainnya		-	2.936.368.833
JUMLAH ASET		13.193.982.355	43.827.492.101
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	3.862.537	1.925.487.623
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.862.537	1.925.487.623
JUMLAH KEWAJIBAN		3.862.537	1.925.487.623
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	13.190.119.818	41.902.004.478
JUMLAH EKUITAS		13.190.119.818	41.902.004.478
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.193.982.355	43.827.492.101

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	24.144.635	14.090.505
JUMLAH PENDAPATAN		24.144.635	14.090.505
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.953.181.131	6.694.029.133
Beban Persediaan	D.3	6.635.691	11.908.685.627
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.658.614.062	103.480.240.125
Beban Pemeliharaan	D.5	288.732.704	239.963.838
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.583.465.921	24.301.250.147
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.472.823.467	1.360.382.104
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		24.963.452.976	147.984.550.974
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(24.939.308.341)	(147.970.460.469)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit Kegiatan non Operasional Lainnya		1.957.814.660	36.843.568
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.957.814.660	36.843.568
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22.981.493.681)	(147.933.616.901)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(22.981.493.681)	(147.933.616.901)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	41.902.004.478	58.316.999.524
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(22.981.493.681)	(147.933.616.901)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(23.232.143.649)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKALSIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	(205.000)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	(23.231.938.649)	-
JUMLAH		(23.232.143.649)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	17.501.752.670	131.518.621.855
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(28.711.884.660)	(16.414.995.046)
EKUITAS AKHIR	E.5	13.190.119.818	41.902.004.478

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Komisi Pemilihan Umum sebagai sebagai suatu lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(1) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing

disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	10%

	Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

(2) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);;
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

(3) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset

lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(5) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(6) Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Realisasi

Pendapatan

Rp368.074.87

1

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp368,074,871 atau mencapai nol persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	368.074.871	-
Jumlah	-	368.074.871	-

Realisasi Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 1327,73% dikarenakan adanya pengembalian belanja berupa kelebihan pembayaran atas Jasa KAP Pemilu 2024, pengembalian belanja Pemilihan Serentak Tahun 2024 denda keterlambatan pengadaan renovasi gedung kantor KPU Provinsi Sumatera Barat

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	368.074.871	25.780.505	1327,73
Jumlah	368.074.871	25.780.505	1327,73

Realisasi

Belanja Negara

Rp22.407.882.5

64

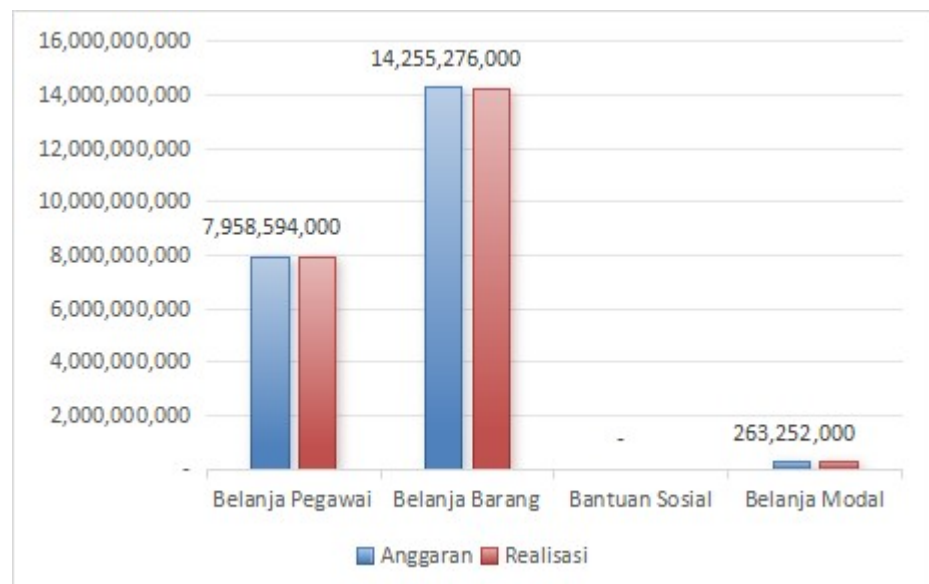
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.407.882.564 atau 99.69% dari anggaran belanja sebesar Rp22.477.122.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2025*

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.958.594.000	7.950.253.131	99,90
Belanja Barang	14.255.276.000	14.194.688.985	99,57
Belanja Modal	263.252.000	262.940.448	99,88
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	22.477.122.000	22.407.882.564	99,69
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	22.477.122.000	22.407.882.564	99,69

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 86.82% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada TA 2025 pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah diselesaikan. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak tersebut telah dipertanggungjawabkan pada tahun 2024, pada tahun 2025 realisasi belanja hibah hanya terkait belanja modal dan belanja barang, dan belanja rutin. Dengan demikian pada Tahun 2025 terdapat penurunan belanja yang signifikan seiring dengan telah selesainya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7.950.253.131	6.694.029.133	18,77
Belanja Barang	14.194.688.985	157.787.278.213	(91,00)
Belanja Modal	262.940.448	5.534.592.694	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	22.407.882.564	170.015.900.040	(86,82)

*Belanja
Pegawai
7.950.253.131*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.950.253.131 dan Rp6.694.029.133. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,73

persen dari 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pegawai pindahan, kenaikan pangkat pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, penambahan jumlah tanggungan dan pembayaran tunjangan untuk pejabat fungsional di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, dan adanya penambahan pegawai PPPK sebanyak 3 (tiga) orang Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

*Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.373.313.214	5.373.313.214	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.320.717.000	1.320.717.000	-
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi			-
Jumlah Belanja Kotor	6.694.030.214	6.694.030.214	-
Pengembalian Belanja Pegawai	1.081	1.081	-
Jumlah Belanja	6.694.029.133	6.694.029.133	-

Belanja

Barang

Rp157.787.278.

213

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp157.787.278.213 dan Rp43.527.444.199. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 72.41% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan pada TA 2024 Tahapan Pemilu 2024 dan juga pelaksanaan Pemilu 2024 sudah diselesaikan dan dilaksanakan secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiataannya baik itu berupa pengadaan logistik Pemilu 2024, rapat-rapat dalam bentuk paket meeting dan juga monitoring berupa perjalanan dinas, pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024, penetapan hasil perolehan suara Pemilu 2024, dan juga tahapan PPHU untuk Pemilu 2024 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Begitu

juga dengan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 baik tahapan dan pelaksanaannya telah dipertanggungjawabkan di Tahun Anggaran 2024 berupa pengadaan logistik Pemilihan Serentak 2024, rapat-rapat dalam bentuk paket meeting dan juga monitoring berupa perjalanan dinas, pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024, pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Serentak 2024, penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Serentak 2024, dan juga tahapan PHPU untuk Pemilihan Serentak 2024 beberapa telah dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian pada Tahun 2024 terdapat kenaikan belanja yang signifikan seiring dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dibandingkan dengan TA 2023 dimana realisasi berupa pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 saja. .

*Perbandingan Belanja Barang Tahunan
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	6.048.797.529	5.913.764.676	2,23%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.636.500	0,00%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	282.414.900	162.516.000	42,45%
Beban Barang Operasional Lainnya	104.568.000	107.883.500	-3,17%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	0	0	0,00%
Beban Bahan	19.311.035.412	1.705.963.809	91,17%
Beban Honor Output Kegiatan	17.435.881.000	638.125.000	96,34%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	17.782.482.461	1.770.092.800	90,05%
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16.369.700	34.721.750	-112,11%
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	28.480.137.867	7.197.854.179	74,73%
Beban Langganan Listrik	210.326.226	132.573.293	36,97%
Beban Langganan Telepon	560.680	740.744	-32,12%
Beban Langganan Air	24.145.800	10.333.600	57,20%
Beban Sewa	13.067.133.072	10.097.225.316	22,73%
Beban Jasa Lainnya	30.249.801.114	4.957.614.006	83,61%
Beban Jasa Profesi	348.500.000	79.860.000	77,08%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		0	0,00%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.976.000	370.088.703	-761,15%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.987.838	198.206.425	-0,62%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.738.218.482	4.154.711.152	46,31%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.698.081.850	401.860.000	92,95%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.587.687.731	3.254.220.000	62,11%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.214.249.584	2.470.301.672	-11,56%
Jumlah Belanja Kotor	157.840.355.246	43.660.293.125	72,34%
Pengembalian Belanja	(53.077.033)	132.848.926	0,00%
Jumlah Belanja	157.787.278.213	43.527.444.199	72,41%

Belanja Modal
Rp5.534.592.6
94

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.534.592.694 dan Rp3.131.852.250. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 memiliki kenaikan dibandingkan dengan TA 2023 yaitu sebesar 0.43% disebabkan adanya penambahan belanja modal terakhir dengan renovasi gedung kantor KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.251.114.230	2.963.573.800	(1,37)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.149.957.000	168.278.450	0,96
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Renovasi Gedung	133.521.464	0	1,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.534.592.694	3.131.852.250	0,43
Pengembalian Belanja	-	0	-
Jumlah Belanja	5.534.592.694	3.131.852.250	0,43

Belanja Modal Tanah Rp0 **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 masih sama nol persen dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI II TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal Peralatan & Mesin Rp1.251.114.230 **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp1.251.114.230 dan Rp2.963.573.800.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	0	0	0,00
Laptop		0	
Peralatan Lainnya	1.251.114.230	2.963.573.800	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.251.114.230	2.963.573.800	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.251.114.230	2.963.573.800	0,00

Belanja Modal Gedung & Bangunan Rp4.283.478.464

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.149.957.000 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	4.149.957.000	92.300.000	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	133.521.464	7.978.450	94,02
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		68.000.000	
Jumlah Belanja Kotor	0	168.278.450	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Lainnya

TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik (Turun) %
Software Komputer	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024

merupakan Uang Persediaan (UP) yang diajukan pada awal tahun 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2024 Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan dan sisanya telah disetor ke kas negara, sehingga kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp27.794.974.912

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp27.794.974.912 dan Rp50.324.645.231 .

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Untuk Tahun 2024 kas lainnya dan setara kas di Bendahara senilai Rp.27.794.974.912 yang merupakan hibah dalam negeri bentuk uang yang merupakan hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 senilai Rp 27.769.993.672 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 yang belum disetorkan senilai Rp24.981.240. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24.981.240	
Kas Lainnya di K/L dari hibah	27.769.933.672	
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	
Jumlah	27.794.914.912	-

1. Kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 24.981.240,- yang merupakan jasa giro bulan Desember 2024 yang belum disetorkan per 31

Desember 2024

2. Kas lainnya di K/L dari hibah sebesar Rp.27.794.974.912,- merupakan hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang akan digunakan kembali di tahun 2025.

Piutang PNB

Rp0

C.3 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar

Tagihan

TP/TGR

Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	xxx		-
2	xxx		-
3	xxx		-
4	xxx		-
Jumlah			-

*Bagian Lancar
TPA Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0*

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp1.290.726.656*

C.7 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.290.726.656 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dibayar dimuka merupakan sewa gudang logistik di beberapa KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesir	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Logistik	1,290,726,656	-
Jumlah	-	-

REKAP SEWA DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2024 YANG MENGGUNAKAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2024		
No	Nama Satker	Belanja di bayar dimuka pada 31 Des 2024
1	KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 63.333.328
		Rp 63.333.328
2	KPU Kabupaten Solok Selatan	Rp 19.000.000
3	KPU Kabupaten Dharmas Raya	Rp 91.760.000
4	KPU Kabupaten Tanah Datar	Rp 192.000.000
5	KPU Kabupaten Padang Pariaman	Rp 179.250.000
6	KPU Kabupaten Pasaman	Rp 115.500.000
7	KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp 75.000.000
8	KPU Kota Sawahlunto	Rp 30.200.000
9	KPU Kota Bukittinggi	Rp 96.200.000
10	KPU Kota Payakumbuh	Rp 72.750.000
11	KPU Provinsi Sumatera Barat	Rp 41.000.000
		Rp 37.000.000
		Rp 28.000.000
		Rp 40.000.000
		Rp 146.400.000
Total		1.290.726.656

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp C.9 Persediaan

0,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang konsumsi	-	-
Bahan Baku	-	-
<i>Jumlah</i>	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Bagian Lancar C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Tagihan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
TP/TGR (Netto) (Netto)

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR (Netto) merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	xxx		-
2	xxx		-
3	xxx		-
4	xxx		-
Jumlah			-

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 Rp0 karena tidak ada tagihan TGR dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0
152121	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan	0	0
152131	TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	0	0

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada

pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

No	Debitur	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	xxx	-	-
2	xxx	-	-
3	xxx	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp115.582. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang per 31 Desember 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	23.116.250	0,50%	115581,25
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	23.116.250	0,00%	115.581
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		23.116.250	115.581

Tagihan
TP/TGR (Netto)
Rp0

C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) per tanggal 31 Desember 2024 Rp0 karena tidak ada tagihan TGR dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR (Netto) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0
152121	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan	0	0
152131	TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	0	0

Tanah

C.15 Tanah

Rp
3.111.363.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.111.363.000,- dan Rp 3.111.363.000,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3.111.363.000
Mutasi tambah:	0
- Hibah Tanah	0
Mutasi kurang	
-	0
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	3.111.363.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah per 31 Desember 2024

No	Luas (m2)	Lokasi	Nilai
1	2127	Kel. Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang	2.426.907.000
2	1501	Jl. Pramuka No. 9 Kota Padang	684.456.000
Jumlah			3.111.363.000

*Peralatan dan Mesin
Rp.
9.510.792.200
,-*

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp 9.510.792.200,- dan Rp. 8.236.884.390. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	8.236.884.390
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.245.872.810
Hibah Barang	0
Perolehan lainnya	28.035.000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Saldo per 31 Desember 2024	9.510.792.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	4.985.777.831
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.525.014.369

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa :

No	Nama Barang	Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Laptop	ACER TRAVELMATE P414 CORE I7 (TMP414/RN/0002)	3		Rp 94.500.000
2	Lemari Arsip	CARTER LEMARI ARSIP TINGGI PINTU KACA	6	Rp 2.852.700	Rp 17.116.200
3	Laptop	ACER TRAVELMATE P414 CORE I7 (TMP414/RN/0002)	1		Rp 31.500.000
4	Lensa Kamera	E 10-20MM F/4 PZ G LENS (SELP1020G)	1		Rp 11.000.000
5	Meja Kerja	MOZA MEJA KERJA MANAGER 1816 (WLN GREY)	6	Rp 5.999.550	Rp 35.997.300
6	Meja Kerja Staf	MOZA MEJA KERJA STAFF 140 (WALNUT GREY)	9	Rp 2.999.220	Rp 26.992.980
7	Meja Lipat	YARD MEJA LIPAT 120X45X75 (GREY)	10	Rp 1.054.500	Rp 10.545.000
8	Kursi	KURSI DIREKTUR ULYSSES SANDARAN TINGGI	6	Rp 5.199.240	Rp 31.195.440
9	Kursi	KURSI MANAGER G COUNCIL SANDARAN TINGGI	6	Rp 2.299.920	Rp 13.799.520
10	Kursi	UZZIEL KURSI KANTOR SANDARAN SEDANG	35	Rp 1.149.960	Rp 40.248.600
11	Sofa	CHEERS MACLAINE SOFA SET 1S+2S+3S (BROWN)	1	Rp 28.006.410	Rp 28.006.410
12	Meja Kerja Staf	SIEBEN 3 - MEJA WORKSTATION 2 DUDUKAN -	3	Rp 5.424.570	Rp 16.273.710
13	Meja Kerja Staf	MOZA MEJA KERJA STAFF 120 (WALNUT GREY)	21	Rp 2.499.720	Rp 52.494.120
14	Kursi	OSCAR KURSI KANTOR SANDARAN RENDAH	6	Rp 873.570	Rp 5.241.420
15	Sofa	CHEERS MORENO SOFA 3 DUDUKAN (COKELAT)	5	Rp 13.197.900	Rp 65.989.500
16	Video Tron	Videotron Indoor TKDN P2.5 1 sisi	1		Rp 259.584.000
Total					Rp 740.484.200

No	Nama Barang	Tipe	Jumlah	Jumlah
1	Podium	Podium	3	Rp 18.000.000
2	MIC Wirelss	MIC MEJA RAPAT WIRELESS AP-949WMT-8CH UHF DIGITAL	1	Rp 21.500.000
3	Printer Portable	WorkForce WF-100 Wi-Fi Inkjet Printer	1	Rp 4.750.000
4	PC	VERITON Z4 AIO - CORE I7 (VZ4/0033)	3	Rp 72.000.000
5	Kamera	SONY A6700 KIT 16-50MM MIRRORLESS CAMERA ALPHA	1	Rp 23.000.000
6	Lensa Zoom	SONY FE 100-400MM F/4.5-5.6 GM OSS LENS	1	Rp 39.500.000
7	Stabilizer Kamera	DJI RS 4 Pro Gimbal Stabiliser Combo	1	Rp 20.500.000
8	Remote Drone	DJI FPV Remote Controller 2 FC7BGC	1	Rp 2.700.000
9	Video Transmitter	Hollyland Mars 400S Pro Wireless Video Receiver	2	Rp 14.000.000
10	Video Mixer Portabl	AVMATRIX SHARK S4 PLUS 4-CH SDI/HDMI VIDEO SWITCHER	1	Rp 13.000.000
11	BEHRINGER U-	U-Phoria Soundcard UM2 Audiophile 2x2 USB	1	Rp 1.400.000
12	Microphone	PodMic USB Dynamic Broadcast Microphone	2	Rp 6.400.000
13	Mixer Prodoction	CASTER PRO II	1	Rp 11.000.000
14	Kamera	DSLR - Sony Alpha A7 IV Kit 28-70mm	1	Rp 39.000.000
15	Flash Eksternal Kam	Flash V860 III	1	Rp 2.800.000
16	Video Light	LED 500C VIDEO LIGHT	1	Rp 2.700.000
17	Tas Travel Kamera	KNF Concept 20L Tas Travel Camera Backpack Waterproof		Rp 1.400.000
18	Lemari Arsip	Rhein High Cabinet	1	Rp 3.519.000
19	Rak Sepatu	Lucia Cabinet Sliding	2	Rp 2.998.000
20	Lensa Kamera	NIKON AF-S dx 18-140mm F/3.5-5.6 G ED VR	1	Rp 7.700.000
21	Headphone	HEADPHONE AKG K 77	2	Rp 2.800.000
22	Lemari Es	SHARP Kulkas mini portable 45L - minibar SJ-50MB-XW	1	Rp 2.000.000
23	Web Cam	logitech MX Brio UHD 4K Webcam	1	Rp 3.000.000
24	Printer	ECOTANK L15150	1	Rp 17.000.000
25	Kamera	SONY ALPHA 7 III (BODI + LENS ZOOM 28-70MM)	1	Rp 32.000.000
26	Scanner	FUJITSU Scanner SP-1130N	1	Rp 9.800.000
27	Laptop	TRAVELMATE P414 CORE I7 (TMP414/RN/0002)	1	Rp 31.500.000
28	Laptop	EXPERTBOOK BG1408CVA I7/16GB/1TB SSD/WIN HOME	1	Rp 24.000.000
29	Kamera	SONY A6700 KIT 16-50MM MIRRORLESS CAMERA ALPHA	1	Rp 23.000.000
30	PC	ACER VERITON Z4 AIO - CORE I7 (VZ4/0033)	1	Rp 24.000.000
31	Lemari Kayu	SIDE BOARD LOTUS 120	1	Rp 1.347.540
32	Lemari Arsip Besi	LEMARI ARSIP BESI ALS-2DL PUTIH	1	Rp 2.288.820
33	Lemari Arsip Besi	LEMARI ARSIP BESI ALS-2GDL	1	Rp 2.327.670
34	Lemari Es	SHARP Kulkas mini portable 45L - minibar SJ-50MB-XW	3	Rp 6.000.000
35	Brankas	Fire Resistant Safes Large Size	1	Rp 20.899.000
Total				Rp 509.830.030

Perolehan lainnya senilai Rp. 28.035.000 merupakan

reward bank BTN atas dana hibah Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 berupa pembelian dispenser merk Modena sebanyak 9 unit.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
988.149.650,-*

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 988.149.650 dan Rp. 988.149.650 ,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	988.149.650
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang :	-
Reval	
Saldo per 31 Desember 2024	988.149.650
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	137.570.333
Nilai Buku per 31 Desember 2024	850.579.317

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi Rp
0,-*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Aset Tetap
Lainnya
Rp3.318.465.014,-

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 3.318.465.014,- dan Rp. 72.475.800,-. Rincian aset tetap lainnya ini untuk Tahun Anggaran 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	72.475.800
Mutasi tambah:	
- Penambahan Gedung Bangunan Perencanaan	3.245.989.214
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	3.318.465.014
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3.318.465.014

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0,-

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.123.348.1
64

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp 5.123.348.164,- dan Rp 3.762.966.060,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.510.792.200	4.985.777.831	4.525.014.369
2	Gedung dan Bangunan	988.149.650	137.570.333	850.579.317
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	72.475.800	0	72.475.800
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		10.571.417.650	5.123.348.164	5.448.069.486

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaanya
Rp.
2.936.368.833,-

C.22 Dana Yang Dibatasi Penggunaanya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaanya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 2.936.368.833,- dan Rp. 0,-. Rincian transaksi terhadap Dana Yang Dibatasi Penggunaanya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Rekening RPATA terkait renovasi Gedung Kantor	2.936.368.833
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2024	2.936.368.833
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 September 2024	-
Nilai Buku per 30 September 2024	2.936.368.833

Aset Lain-Lain **C.23 Aset Lain-Lain**

Rp.
298.932.130,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.298.932.130,- dan Rp. 298.932.130,- .Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	298.932.130
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	0
- Penghapusan BMN	0
Saldo per 31 Desember 2024	298.932.130
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	298.932.130

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp
298.932.130,-

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp 298.932.130,- dan Rp 583.932.130,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	298.932.130	298.932.130	0
Jumlah	298.932.130	298.932.130	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp1.925.487.6
23*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.925.487.623 dan Rp653.552.487. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

1	Belanja Air Yang Masih Harus Dibayar	1.626.800
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	1.923.860.823
	Jumlah	1.925.487.623

Belanja air yang masih harus dibayar merupakan belanja

air bulan Desember 2023 yang baru dibayar pada Januari 2025. Sedangkan belanja barang yang masih harus dibayar merupakan dana yang terdapat pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk pembayaran terkait renovasi gedung kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.

*Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.27 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

*Perbandingan Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	-	-	-
2			
Jumlah		-	-

*Pendapatan
Diterima Di
Muka Rp0*

C.28 Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

*Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	-	-

*Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp0*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.100.200 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan

dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

*Perbandingan Rincian Utang jangka Pendek Lainnya
31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022*

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	-	-	-
2			
Jumlah		-	-

*Hibah yang
belum
disahkan Rp0*

C.30 Hibah yang belum disahkan

Saldo Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah yang belum disahkan merupakan hibah yang belum dilakukan pengesahan ke KPPN.

*Perbandingan Hibah yang belum disahkan
31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023*

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	-	-	-
2			
Jumlah		-	-

*Ekuitas
Rp41.902.004.
478*

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.902.004.478 dan Rp58.316.999.524. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN**OPERASIONAL**

Pendapatan

PNBP

Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.090.505 dan Rp0.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban

Pegawai

Rp6.694.029.1

33

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.694.029.133 dan Rp5.832.504.209. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	%
Beban Gaji	2.080.689.400	1.828.621.100	14
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.320	26.350	7
Beban Tunjangan Suami Istri PNS	144.748.700	122.290.210	18
Beban Tunjangan Anak PNS	53.611.794	44.699.020	20
Beban Tunjangan Struktural PNS	188.810.000	186.620.000	1
Beban Tunjangan Fungsional PNS	61.318.000	39.700.000	54
Beban Tunjangan PPh PNS	22.344.295	10.979.459	104
Beban Tunjangan Beras PNS	116.378.940	110.875.020	5
Beban Uang Makan PNS	147.755.000	213.114.700	-31
Beban Tunjangan Umum PNS	50.850.000	51.145.000	-1
Beban Uang Lembur	0	0	0
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.320.717.000	1.302.773.000	1
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.390.699.546	1.921.660.350	24
Beban Gaji Pokok PPPK	80.090.000	-	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.410		
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.009.000		
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.178.448		
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	13.500.000		
Beban Tunjangan Beras PPPK	6.083.280		
Beban Uang Makan PPPK	6.216.000		
Jumlah	6.694.029.133	5.832.504.209	15

**Beban
Persediaan
Rp11.908.685.6
27**

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.908.685.627 dan Rp152.165.210. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	165.761.340	152.165.210	9
Persediaan bahan baku	11.742.924.287	-	0
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Jumlah	11.908.685.627	152.165.210	7.726

Beban Barang
dan Jasa
Rp103.480.24
0.125

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp103.480.240.125 dan Rp25.831.927.047. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	%
Beban Keperluan Perkantoran	6.048.797.529	6.196.118.962	(2,38)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.504.000	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	282.414.900	162.516.000	73,78
Beban Barang Operasional Lainnya	320.868.000	107.883.500	197,42
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	21.611.120	34.721.750	(37,76)
Beban Bahan	19.311.035.412	1.698.129.909	1037,19
Beban Honor Output Kegiatan	17.430.301.000	638.125.000	2631,49
Beban Barang Non Operasional Lainnya	17.566.182.461	1.728.347.800	916,36
Beban Langganan Listrik	210.326.226	122.086.489	72,28
Beban Langganan Telepon	560.680	458.628	22,25
Beban Langganan Air	23.944.800	10.864.100	120,40
Beban Sewa	11.776.406.416	10.097.225.316	16,63
Beban Jasa Lainnya	30.139.291.581	4.954.085.593	508,37
Beban Jasa Profesi	348.500.000	79.860.000	336,39
Jumlah	103.480.240.125	25.831.927.047	300,59

Beban
Pemeliharaan
Rp239.963.838

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp239.963.838 dan Rp504.269.128. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.976.000	322.071.703	87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.987.838	182.197.425	8
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0,00
Jumlah	239.963.838	504.269.128	52

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp24.301.250.147

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.301.250.147 dan Rp9.994.439.587. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	7.732.758.482	4.419.879.962	74,95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.698.081.850	352.210.000	1517,81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.656.687.731	3.207.740.000	169,87
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.213.722.084	2.014.609.625	9,88
Jumlah	24.301.250.147	9.994.439.587	143,15

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat*

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban
Penyesuaian
Nilai
Persediaan
Rp0

D.8 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	% NAIK (TURUN)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp1.360.382.104

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.360.382.104 dan Rp698.784.489. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.338.555.763	677.916.174	97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.826.341	20.868.315	5
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	1.360.382.104	698.784.489	95
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.360.382.104	698.784.489	95

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(42.238). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	-42.238	0,00
Jumlah	0	-42.238	0,00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp36.843.568

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang Lalu	11.690.000	5.580.000	109,50
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	672.866.845	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	0	-
BebanKegiatan Non Operasional Lainnya	-647.713.277	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	36.843.568	5.580.000	560,28 *)

Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar
Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<p>Ekuitas Awal Rp58.316.999.524</p>	<p>E.1 Ekuitas Awal</p> <p>Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.316.999.524 dan Rp4.028.573.829</p>
<p>Defisit LO Rp(147.933.616.901)</p>	<p>E.2 Surplus (Defisit) LO</p> <p>Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp147.933.616.901 dan Rp43.008.467.432. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.</p>
<p>Penyesuaian Nilai Aset Rp0</p>	<p>E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset</p> <p>Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.</p>
<p>Koreksi Nilai Persediaan Rp0</p>	<p>E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan</p> <p>Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:</p>

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap****Revaluasi Aset Tetap Rp0**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rp0.

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0**E.3.4 Koreksi atas Reklasifikasi**

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-
Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi
Antar Entitas
Rp131.518.62
1.855

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp131.518.621.855 dan Rp97.301.041.251. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(25.780.505)
Ditagihkan ke Entitas Lain	68.991.512.739
Transfer Masuk	1.768.000
Transfer Keluar	(15.925.506.963)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	78.476.628.584
Jumlah	131.518.621.855

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(25.780.505) sedangkan DKEL sebesar Rp68.991.512.739.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
2	Persediaan		1.768.000
	Jumlah		1.768.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp14.336.979.908,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Uang	Rp 78.476.628.584
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Barang (Tanah)	Rp -
Total Pengesahan			Rp 78.476.628.584
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 78.476.628.584

Ekuitas Akhir

Rp41.902.004.478

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.902.004.478 dan Rp58.316.999.524.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.925.487.623 yang terdiri dari Utang pada pihak ketiga yang merupakan jurnal dari utang yang belum diterima tagihannya sebesar Rp. 1.898.879.583,- dan untuk transaksi ini telah diterbitkan SP2D nya nomor 259991304000290 tanggal 8 Januari 2025 dengan invoice nomor 00011T/654301/2025 Tanggal 2 Januari 2025

Untuk Jasa Giro Hibah Pilkada 2024 bulan Desember 2024 sebesar Rp 24.981.240,- dan telah disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Januari 2025.

Pada KPU Provinsi Sumatera Barat terdapat *to do list* yaitu Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN Tidak Wajar yang merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan pada KPU Provinsi Sumatera Barat yang seharusnya menggunakan akun belanja modal lainnya 536111, sedangkan KPU Provinsi Sumatera Barat menggunakan akun 533111.

Dan terdapat juga belanja modal peralatan dan mesin yang tidak sesuai kode akun yaitu belanja modal peralatan dan mesin dibawah Rp.1.000.000,- yang seharusnya menggunakan akun belanja barang ekstrakomptabel (521252)

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Hibah

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, berikut ini proses dan implementasi hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 128.794.380.973,- (seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
2. Pemberian hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 128.794.380.973,- (seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : Nomor : 270/16/BKPol/2023 Nomor : 02/PR.07-NK/13/2023 pada tanggal 18 Desember senilai Rp. 128.794.380.973,-.
3. KPU Provinsi Sumatera Barat membuka rekening hibah sebagaimana surat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang Nomor S-000151/WPB.03/KP.01/SPRINT/2023 tanggal 22 Desember 2023 Perihal Persetujuan Pembukaan

Rekening Lainnya Atas Nama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nama rekening dana hibah KPU Provinsi Sumatera Barat “RPL 010 PDHL KPU SUMBAR UTK 2N559QNA”. Rekening dibuka pada Bank BTN Cabang Padang dengan Nomor Rekening “0000901300010749” dengan nama rekening “RPL 010 PDHL KPU SUMBAR UTK 2N559QNA”.

4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sehingga KPU Kabupaten/Kota wajib mengangkat bendahara pengeluaran pembantu yang akan mengelola dana hibah yang ditransfer oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Persetujuan rekening untuk KPU Kabupaten/ Kota sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dikeluarkan oleh Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara Padang untuk 20 rekening BPP yang akan dikelola oleh 20 BPP se Sumatera Barat.
5. Register hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah diterbitkan oleh Kanwil DJPN Sumatera Barat melalui Surat Nomor S-3536/WPB.03/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan nomor register 2N559QNA.
6. Untuk Dana Hibah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan III TA 2024 adalah sebesar Rp. 78.476.628.584, sehingga KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerima semua dana hibah sesuai yang tercantum dalam NPHD sebesar Rp. Rp.

128.794.380.973, untuk penerimaan ini belum dilakukan pengesahan pendapatan.

7. KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan revisi hibah ke DIPA APBN Tahun anggaran 2024 melalui Revisi ke 06 DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.654301/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp. 43.003.452.00,-.
8. Pengesahan hibah ke KPPN Padang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00335A tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 50.317.752.389,00,- dan telah diterbitkan SPHL dengan nomor 230100000000082 Tanggal 31 Desember 2023.
9. Pengesahan hibah ke KPPN Padang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00325A tanggal 3 Oktober 2024 sebesar Rp. 78.476.628.584,00,- dan telah diterbitkan SPHL dengan nomor 240100000000000 Tanggal 3 Oktober 2024.
10. KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan SP2HL belanja hibah pada tahun 2024 dengan total SP2HL belanja sebesar Rp. 101.024.387.301,- untuk seluruh rekening penampungan pada 20 (dua puluh) Bendahara Pengeluaran Pembantu.

29	230100600570010	26-11-2024	28-11-2024	135,369,600	00397T/654301/2024	25-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
30	230100600570009	22-11-2024	25-11-2024	1,866,355,000	00393T/654301/2024	21-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
31	230100600570008	20-11-2024	20-11-2024	295,376,001	00389T/654301/2024	19-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
32	230100600570007	20-11-2024	20-11-2024	2,125,247,000	00386T/654301/2024	18-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
33	230100600570006	20-11-2024	20-11-2024	2,228,090,700	00387T/654301/2024	19-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
34	230100600570005	18-11-2024	19-11-2024	1,425,647,500	00374T/654301/2024	18-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
35	230100600570004	15-11-2024	18-11-2024	1,766,398,000	00375T/654301/2024	13-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
36	230100600570003	08-11-2024	11-11-2024	704,637,730	00369T/654301/2024	06-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
37	230100600570001	07-11-2024	07-11-2024	999,573,000	00367T/654301/2024	05-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
38	230100600570002	07-11-2024	07-11-2024	439,859,500	00373T/654301/2024	06-11-2024	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Uang TA 2024 untuk kegiatan pemilihan Gubernur Tahun 2024 sesuai NPHD Nomor : 270/16/BK/Pol/2023 Tanggal 18 Desember 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

11. Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat sisa kas hibah pada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 27.769.993.672,-.
12. Pengesahan belanja hibah untuk tahun 2025 ke KPPN Padang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00100A tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp. 3.275.866.814,- dan telah diterbitkan SPHL dengan nomor 250100600300001 Tanggal 27 Maret 2025.
13. Pengesahan belanja hibah untuk tahun 2025 ke KPPN Padang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00120A tanggal 15 April 2025 sebesar Rp. 1,262,188,209,- dan telah diterbitkan SPHL dengan nomor 250100600300002 Tanggal 15 April 2025.
14. Dengan telah berakhirnya seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 maka KPU Provinsi Sumatera Barat harus melakukan pengembalian hibah

tersebut apabila bersisa.

15. KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengembalian atas sisa hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 melalui KPPN Padang dengan mengajukan SP4HL sebesar Rp 23,231,938,649; pada tanggal 21 April 2025 dan telah diterbitkan SP3HL dengan nomor 250100600300003 Tanggal 22 April 2025

b. Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Irzal Zamzami, S.Sos.M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Efri Nofrita, SE,M.Si
Pejabat PPSPM	: Yurika Amalia, SE, M.Si
Bendahara	: Rahmat Hidayat, S.Ap

Sampai dengan 30 Juni 2025 terdapat perubahan personil Pengelola Keuangan Sebanyak 3 (tiga) kali perubahan. Perubahan ini disebabkan karena adanya pergantian personil pengelola keuangan. Untuk Pejabat Pengelola Keuangan yang tercantum dalam SK perubahan terakhir Nomor 39 Tahun 2025 Tanggal 2

Mei 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sekrteriat Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Irzal Zamzami, S.Sos.M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Yenrizal Efendi, SE
Pejabat PPSPM	: Efri Nofrita, SE,M.Si
Bendahara	: Rahmat Hidayat, S.Ap



Sekretaris,

Irzal Zamzami, S.Sos. M.Si
NIP 197403101993031002

KOMISI PEMILIHAN UMUM SATKER KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		01-01-2024	Per 31-12-2024	Per 31-12-2024	Per 31-12-2024
A	Tanah						
1	Tanah	-	3.111.630.000	-	-	-	3.111.630.000
	Jumlah		3.111.630.000	-	-	-	3.111.630.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor		686.750.000	(511.660.715)	(87.392.857)	(599.053.572)	87.696.428
2	Alat Bengkel Tak Bermesin		4.765.000	(476.500)	(953.000)	(1.429.500)	3.335.500
3	Alat Kantor		516.519.580	(396.735.650)	(28.930.423)	(425.666.073)	90.853.507
4	Alat Rumah Tangga		1.606.738.010	(722.436.010)	(161.581.838)	(884.017.848)	722.720.162
5	Alat Studio		3.109.584.850	(381.886.350)	(557.264.400)	(939.150.750)	2.170.434.100
6	Alat Komunikasi		19.000.000	(5.000.000)	(1.400.000)	(6.400.000)	12.600.000
7	Peralatan Pemancar		304.450.000	(15.350.000)	(30.205.000)	(45.555.000)	258.895.000
8	Peralatan Komunikasi Navigasi		2.000.000	(1.399.998)	(133.334)	(1.533.332)	466.668
9	Komputer Unit		2.311.606.750	(886.407.835)	(401.458.411)	(1.287.866.246)	1.023.740.504
10	Peralatan Komputer		944.378.010	(722.369.010)	(68.736.500)	(791.105.510)	153.272.500
11	Alat peraga pelatihan dan percontohan		5.000.000	(3.500.000)	(500.000)	(4.000.000)	1.000.000
	Jumlah		9.510.792.200	(3.647.222.068)	(1.338.555.763)	(4.985.777.831)	4.525.014.369
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja		988.149.650	(115.743.992)	(21.826.341)	(137.570.333)	850.579.317
	Jumlah		988.149.650	-115.743.992	-21.826.341	-137.570.333	850.579.317
D	Aset Tetap Dalam Renovasi						
1	Gedung dan Bangunan dalam renovasi		3.318.465.014	-	-	-	3.318.465.014
	Jumlah		3.318.465.014	-	-	-	3.318.465.014
	Aset tetap yang tdk digunakan dalam operasi pemerintahan						
E							
1	Komputer Unit		230.660.500	(230.660.500)	-	(230.660.500)	-
2	Peralatan Komputer		68.271.630	(68.271.630)	-	(68.271.630)	-
	Jumlah		298.932.130	(298.932.130)	-	(298.932.130)	-
	Total		17.227.968.994	(4.061.898.190)	(1.360.382.104)	(5.422.280.294)	11.805.688.700